

IDENTIFIKASI INDEKS KENYAMANAN KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN KRITERIA CULTURAL HERITAGE

Identification of Liveable Index of Yogyakarta based on Cultural Heritage Criteria

Ayu Candra Kurniati¹, Fahril Fanani²

Diterima: 2 Oktober 2018 Disetujui: 23 November 2018

Abstrak: Kota Yogyakarta merupakan kota dengan nilai index liveable city tertinggi di Indonesia dengan nilai index 68.14% untuk kriteria kehidupan sosial dan 70.89% untuk kriteria perlindungan bangunan bersejarah. Mengingat misi Kota Yogyakarta adalah untuk meningkatkan kualitas budaya dan memperkuat moral, etika serta budaya masyarakat, maka perlu dilakukan kajian indeks kenyamanan berdasarkan kriteria *cultural heritage*. Penelitian ini menggunakan pembobotan data dikotomi, dengan variabel: perubahan fungsi dan bentuk, status kepemilikan dan penggunaan BCB (bangunan cagar budaya) serta jumlah BCB yang dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran. Hasil yang diperoleh adalah nilai indeks kenyamanan Kota Yogyakarta untuk kriteria pelestarian BCB tertinggi berada di kawasan cagar budaya Kotabaru (72%), kemudian kawasan cagar budaya Pakualaman (65%), kawasan cagar budaya Kraton (64,3%), selanjutnya kawasan cagar budaya Malioboro (64%) dan terendah adalah kawasan cagar budaya Kogede (60,6%). Kawasan cagar budaya Kotabaru memiliki indeks kenyamanan tertinggi karena sebanyak 100% BCB tidak mengalami perubahan bentuk, 40% BCB mengalami perubahan fungsi, 20% BCB merupakan milik pribadi, 100% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum dan 100% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih dipertahankan. Kesimpulan yang diperoleh adalah keberadaan bangunan cagar budaya di suatu kota akan menambah nilai identitas lingkungan yang merupakan penciri kawasan dan karakteristik masyarakat yang tinggal didalamnya.

Kata Kunci: indeks kenyamanan, bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, identitas kota

Abstract: Yogyakarta is the livable city in Indonesia with the highest index score, 68.14% for social life and 70.89% for the preservation of cultural heritage building. Considering the mission of Yogyakarta is to enhance cultural quality and strengthen morality, behavior and cultural value of the community, it is considerable to conduct a research regarding to livable city index in Yogyakarta based on the criteria of cultural heritage. Furthermore, this research used scoring dichotomy data as a methodology with variables: the changes in building's form and function, the ownership status and the usage of cultural heritage building, as well as the amount of cultural heritage buildings that have been demolished and/or in the process of demolition. The results show the highest livable index for preservation of cultural heritage building is in cultural preservation area Kotabaru (70%), followed by Pakualaman (65%), Kraton (64.3%), Malioboro (64%) and the least is Kogede (60.6%). Kotabaru

¹ Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional

Korespondensi: ayucandrakurniati@gmail.com

has the highest livable index due to from the total percentage, 100% of the buildings are in the original form, 40% have its function changed, 20% are in personal ownership, 100% are in group/association, and 100% are not demolished. The conclusion of this study is that the existence of cultural heritage building in the city will increase the value of environmental identity which is resembles the character of the area and the community within.

Key words: livable index, cultural heritage building, cultural heritage area, city identity

PENDAHULUAN

Perencanaan kota ideal, sejatinya adalah gabungan antara konsep liveable city dan sustainable city dimana suatu kota mampu untuk menciptakan kondisi lingkungan kota yang mempertahankan kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat kota saat ini maupun masa depan, sehingga menimbulkan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dilihat dari berbagai aspek fisik maupun non fisik (Darise, Tondobala, dst. 2015); (Wheeler, 2004). Kenyamanan sosial (non fisik) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar dalam melakukan interaksi sosial yang nyaman serta melibatkan ruang dan waktu tertentu, dimana kebutuhan dasar diartikan sebagai kebutuhan spasial yakni stimulasi, keamanan dan identitas (Wirastari, Suprihardjo, 2012). Identitas lingkungan dapat dipengaruhi oleh sosial budaya yang merupakan penciri ruang. Hubungan sosial dan identitas menimbulkan rasa yang kuat dengan kawasan permukiman memberikan keinginan yang kuat untuk selalu menetap pada kawasan tersebut

Muttaqin (2010) menjelaskan bahwa terdapat 25 kriteria kota layak huni yang dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) yang berpedoman pada variable utama perkotaan berupa fisik kota, kualitas lingkungan, transportasi-aksesibilitas, fasilitas, utilitas, ekonomi dan sosial. Diantara ke-25 kriteria tersebut, scope penelitian ini berfokus pada kriteria perlindungan bangunan bersejarah. Dalam mengkaji tingkat kenyamanan kota besar di Indonesia, IAP melakukan penilaian kota layak huni (liveable city) dan baru dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Menurut IAP (2014), Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan nilai index liveable city tertinggi di Indonesia dengan nilai index 68.14% untuk kriteria kehidupan sosial dan 70.89% untuk kriteria perlindungan bangunan bersejarah. Berdasarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2017, Kota Yogyakarta memiliki 212 Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang tersebar di lima Kawasan Cagar Budaya (KCB), yaitu KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Malioboro, KCB Kraton dan KCB Pakualaman. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap (Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012).

Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pelestarian benda dan bangunan cagar budaya meningkat setiap tahun, tetapi kasus-kasus (pelanggaran) cagar budaya juga tetap ada (Marbun, 2012). Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi antara lain perubahan bentuk bangunan cagar budaya, dan juga berbagai pelaksanaan pembangunan yang lepas konteks dengan lingkungan cagar budaya (Hadiyanta, 2015; Widyanto, 2016). Menilik dari berbagai permasalahan tersebut dan mengingat misi Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas budaya dan memperkuat moral, etika serta budaya masyarakat Kota Yogyakarta (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2013), maka perlu dilakukan kajian indeks kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan kriteria *cultural heritage*.

Cultural heritage (warisan budaya) yang dimaksud dalam penelitian adalah bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam maupun buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding dan beratap. Variabel yang dipergunakan adalah gabungan antara variabel pelestarian (Pergub DIY No 62 Tahun 2013) dan variabel kenyamanan kota berdasarkan kriteria *cultural heritage* (Bell, 2000); (Tan, Thye. etc. 2014), seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Pemilihan Variabel Penelitian

Pergub DIY No 62 Tahun 2014 (Bell, 2000); (Giap, Thye. etc. 2014)	Perlindungan* Upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran atau kemusnahan	Pengembangan* Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi warisan budaya	Pemanfaatan* Pendayagunaan warisan budaya dan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan
Jumlah bangunan bersejarah	-	-	-
Dana bantuan yang diperoleh melalui “dana bantuan pelestarian cagar budaya”	x	x	-
Perubahan fungsi dan bentuk Status kepemilikan dan penggunaan BCB	x	x	x
Jumlah BCB yang telah dihancurkan/dalam proses penghancuran	x	x	x
x = termasuk dalam upaya pelestarian			

Sumber: Peneliti, 2018

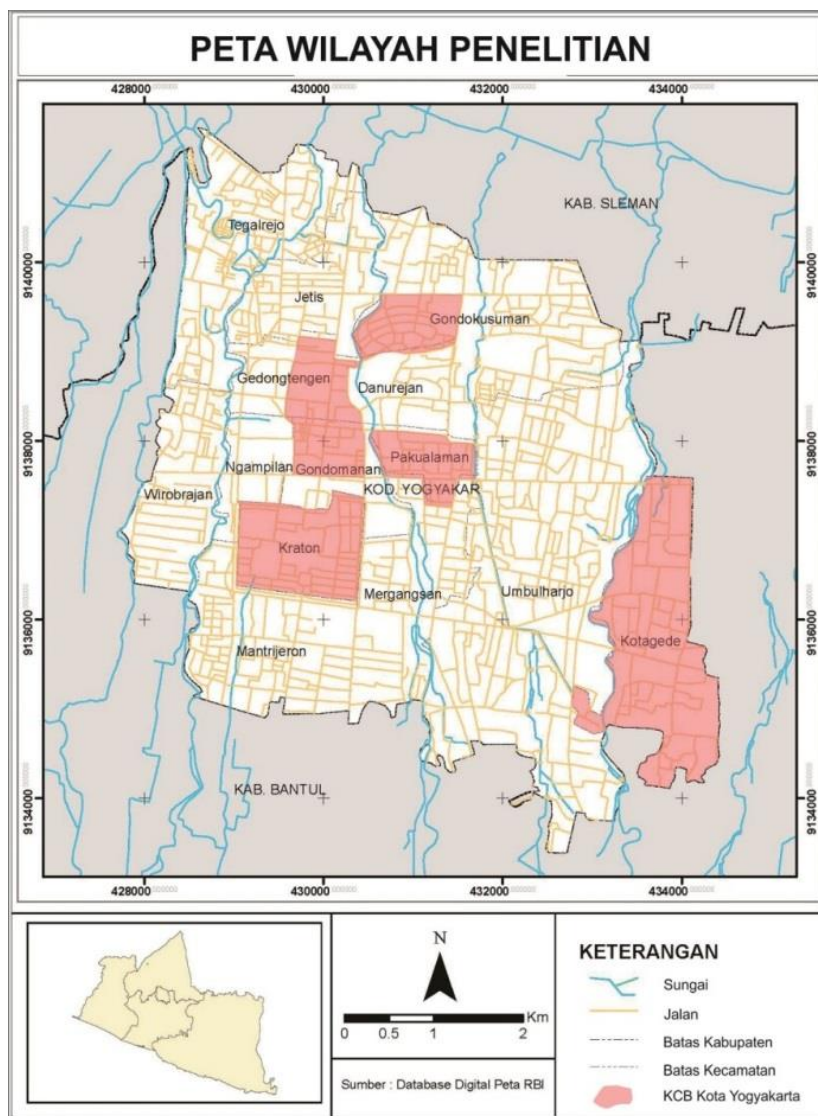
Berdasarkan tujuan penelitian, keterbatasan data serta cakupan wilayah penelitian yang cukup luas, maka variabel penelitian yang dipilih adalah perubahan fungsi dan bentuk BCB, status kepemilikan BCB dan jumlah BCB yang telah dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran di tahun 2017-2018

Penelitian ini dilakukan di lima Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta berdasarkan SK Gubernur Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, yaitu di KCB Malioboro, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, KCB Kraton dan KCB Kotabaru. Peta wilayah studi terdapat pada Gambar 1.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai index kenyamanan berdasarkan kriteria pelestarian bangunan cagar budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data statistik biner yang diperoleh dari survey sekunder. Data biner/dikotomi (Sujarweni, 2015) adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu yang menyatakan kejadian sukses ($Y=1$) dan yang menyatakan kejadian gagal ($Y=0$), dengan asumsi semakin tinggi hasilnya maka semakin tinggi nilai index kenyamanan kota terhadap *cultural heritage* (Bell, 2000). Hasil dari pengumpulan data akan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui frekuensi dan persentasenya. Kemudian hasil pengolahan tersebut akan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif.

Data primer dikumpulkan langsung di lokasi studi dengan melakukan observasi dan kuisisioner. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi bangunan bersejarah dan penggunaan fungsi dari bangunan bersejarah, sedangkan kuisisioner dilakukan untuk mengetahui upaya pelestarian masyarakat terhadap bangunan bersejarah dan perubahan fungsi yang telah dilakukan. Responden untuk kuisisioner adalah sampel dari pemilik bangunan cagar budaya yang terdata pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 68 responden. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan rincian pada Tabel 1.



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian

Tabel 1. Kebutuhan Data Sekunder

No	Jenis Data	Sumber
1	Data perubahan fungsi dan bentuk bangunan bersejarah	Pemerintah Kota Yogyakarta
2	Status kepemilikan bangunan cagar budaya	Pemerintah Kota Yogyakarta
3	Data jumlah bangunan cagar budaya yang telah dihancurkan atau dalam proses penghancuran	Pemerintah Kota Yogyakarta
4	Data jumlah bangunan bersejarah yang terdaftar dalam bangunan cagar budaya	Pemerintah Kota Yogyakarta
5	Data kegiatan preservasi bangunan bersejarah yang dilakukan pemerintah	Pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber: Peneliti, 2018

Penelitian ini mempergunakan sampel untuk penyebaran kuisioner dan pemilihan bangunan cagar budaya. Pengambilan sampel dilakukan karena besarnya populasi jumlah

bangunan yang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya Kota Yogyakarta, yaitu 212 bangunan cagar budaya, dengan rincian: KCB Kotabaru 16 BCB, KCB Malioboro 32 BCB, KCB Pakualaman 21 BCB, KCB Kraton 43 BCB, dan KCB Kotagede 96 BCB. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Cara yang dilakukan untuk pengambilan sampel adalah *Proportioate Stratified Random Sampling* (pengambilan sampel secara bertingkat).

Jumlah ukuran sample menggunakan rumus Slovin, dengan kesalahan (presisi) adalah 10%. Sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah 67,97 (68 sampel), dengan rincian: KCB Kotabaru 5 BCB, KCB Malioboro 10 BCB, KCB Pakualaman 8 BCB, KCB Kraton 14 BCB, dan KCB Kotagede 31 BCB dengan total sampel adalah 68 sampel.

Penelitian ini menggunakan data biner/dikotomi (Sujarweni, 2015) sebagai data penelitian untuk menghitung index kenyamanan Kota Yogyakarta. Data biner/dikotomi adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu yang menyatakan kejadian sukses ($Y=1$) dan yang menyatakan kejadian gagal ($Y=0$), dengan asumsi semakin tinggi hasilnya maka semakin tinggi nilai index kenyamanan kota terhadap pelestarian *cultural heritage* (Bell, 2000); (Pergub DIY, 2013); (Wahyudi, 2015); (Undang-Undang Nomor 5, 1992). Sehingga apabila kegiatan yang dilakukan menambah dan/atau memberikan dampak positif terhadap kegiatan pelestarian bernilai 1 (sukses), sedangkan apabila mengurangi dan/atau memberikan dampak negatif terhadap pelestarian bernilai 0 (gagal), dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel Perubahan Bentuk, apabila TIDAK-Sukses (nilai 1) terjadi perubahan bentuk pada BCB maka nilai index kenyamanan akan semakin rendah, karena hal ini mempengaruhi pelestarian bangunan dimana pada BCB tidak diperbolehkan mengubah bentuk bangunan, kecuali dilakukan pemugaran untuk alasan pelestarian
 - A. YA berubah bentuk (0)
 - B. TIDAK berubah bentuk (1)
2. Variabel Perubahan Fungsi, apabila YA-Sukses (nilai 1) terjadi perubahan fungsi pada BCB maka nilai index kenyamanan akan semakin tinggi, karena hal ini tidak mempengaruhi pelestarian bangunan selama tidak merubah bentuk bangunan. Selain itu, dengan merubahnya fungsi bangunan diharapkan dapat menambah upaya perlindungan, peningkatan potensi bangunan (pengembangan) dan menambah pemanfaatan bangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - A. YA berubah fungsi (1)
 - B. TIDAK berubah fungsi (0)
3. Variabel Status Kepemilikan, apabila YA-Sukses (nilai 1) milik PRIBADI maka nilai index kenyamanan akan semakin tinggi, karena dengan milik pribadi maka semakin tingginya keterkaitan dan keterikatan pemilik bangunan cagar budaya dengan tetap melaksanakan kewajiban sebagai pemilik bangunan cagar budaya yaitu dengan tetap melestarikan sesuai peraturan pelestarian yang berlaku. Kepedulian terhadap bangunan cagar budaya yang dimiliki baik oleh pemerintah dan utamanya milik pribadi, berarti merupakan potensi awal dalam upaya menuju tekad nasional melestarikan budaya bangsa.
 - A. YA - pribadi (1)
 - B. TIDAK – sewa (0)

4. Variabel Penggunaan Bangunan, apabila TIDAK-Sukses (nilai 1) digunakan pribadi/perorangan maka nilai index kenyamanan akan semakin tinggi, karena dengan digunakan kelompok maka dalam membiayai perawatan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya akan lebih mudah mengingat mahalnya biaya pelestarian. Hal ini juga merupakan permasalahan tersendiri bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang notabene merupakan pengguna tunggal/pribadi. Penggunaan personal/pribadi merupakan bangunan dengan fungsi tempat tinggal, sedangkan kelompok dapat berfungsi sebagai restaurant dan fasilitas umum (yang dipergunakan bersama/umum)
 - A. YA- pribadi/perorangan (0)
 - B. TIDAK-kelompok (1)
5. Variabel jumlah bangunan cagar budaya yang dihancurkan atau dalam proses penghancuran, apabila YA-Gagal (0) bangunan dalam proses dan/atau telah dihancurkan, maka nilai index kenyamanan akan semakin berkurang karena menunjukkan kurangnya upaya pelestarian terhadap bangunan cagar budaya.
 - A. YA bangunan dihancurkan/dalam proses penghancuran (0)
 - B. TIDAK dihancurkan/dalam proses penghancuran (1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode skoring yang dilakukan menggunakan data dikotomi/biner dengan skor/bobot 0 untuk jawaban TIDAK dan 1 untuk jawaban IYA dengan total nilai bobot tersebut akan menentukan nilai index kenyamanan kota Yogyakarta dari kriteria pelestarian cagar budaya. Data yang diperoleh dari hasil survey primer menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang dibagikan ke 68 responden yang merupakan pemilik dan/atau pengguna bangunan cagar budaya, dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3. Pembobotan Variabel Kenyamanan berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB

No	KCB	Kode	Variabel Indeks Kenyamanan Berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB				
			Perubahan bentuk bangunan	Perubahan fungsi bangunan	Status kepemilikan bangunan	Status penggunaan bangunan	Bcb yang dihancurkan/ proses penghancuran
1	Malioboro	A1	1	0	0	1	1
2		A2	1	1	0	1	1
3		A4	1	0	0	1	1
4		A5	1	0	0	1	1
5		A6	1	0	0	1	1
6		A8	1	0	0	1	1
7		A11	1	0	0	1	1
8		A12	1	0	1	1	1
9		A13	1	0	0	1	1
10		A15	1	0	0	1	1
TOTAL			10	1	1	10	10
16	Kotabaru	B1	1	0	0	1	1
17		B2	1	0	0	1	1
18		B3	1	1	0	1	1
19		B4	1	1	0	1	1
20		B5	0	1	1	1	1
TOTAL			5	2	1	5	5
24	Pakualaman	C1	1	0	1	0	1
25		C2	1	1	1	0	1
26		C3	1	0	0	1	1
27		C4	1	0	1	0	1
28		C6	1	0	1	0	1

No	KCB	Kode	Variabel Indeks Kenyamanan Berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB				Bcb yang dihancurkan/ proses penghancuran
			Perubahan bentuk bangunan	Perubahan fungsi bangunan	Status kepemilikan bangunan	Status penggunaan bangunan	
29		C7	1	0	1	1	1
30		C9	1	1	0	1	1
31		C10	1	0	0	1	1
TOTAL			8	2	4	4	8
34	Kraton	D1	1	0	0	1	1
35		D2	1	0	0	1	1
36		D3	1	0	0	1	1
37		D4	1	0	0	1	1
38		D6	0	0	0	1	1
39		D7	1	0	0	0	1
40		D8	1	1	0	1	1
41		D9	1	0	1	0	1
42		D11	1	0	1	1	1
43		D12	1	1	1	1	1
44		D13	1	0	0	0	1
45		D14	1	0	0	1	1
46		D16	1	0	1	1	1
47		D21	1	0	1	0	1
TOTAL			14	2	5	10	14
55	Kotagede	E1	1	0	1	0	1
56		E2	1	0	1	0	1
57		E3	1	0	1	0	1
58		E4	1	0	1	0	1
59		E5	1	0	1	0	1
60		E6	1	0	1	0	1
61		E7	1	0	1	0	1
62		E8	1	0	1	0	1
63		E9	1	1	0	1	1
64		E10	1	1	1	1	1
65		E11	1	0	1	0	1
66		E12	1	0	1	1	1
67		E13	1	0	0	1	1
68		E16	1	0	1	0	1
69		E19	0	0	1	0	1
70		E20	1	0	0	1	1
71		E21	1	0	1	0	1
72		E22	1	0	1	0	1
73		E23	1	0	1	0	1
74		E24	1	0	1	0	1
75		E25	1	0	0	1	1
76		E26	1	0	1	0	1
77		E27	1	0	1	0	0
78		E28	1	0	1	0	1
79		E29	0	0	1	0	1
80		E30	0	0	1	0	1
81		E34	0	0	1	0	1
82	E35	1	1	1	0	1	
83	E36	1	0	1	0	1	
84	E38	1	0	0	1	1	
85	E42	1	0	1	1	1	
TOTAL			27	3	26	8	30

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 4. Indeks Kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB

No	KCB	Jumlah Sample Bangunan Cagar Budaya	Normalisasi	Variabel Indeks Kenyamanan Berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB				
				Perubahan Bentuk Bangunan	Perubahan Fungsi Bangunan	Status Kepemilikan Bangunan	Status Penggunaan Bangunan	Bcb Yang Dihancurkan/ Proses Penghancuran
1	Malioboro	10	3.1	10	1	1	10	10
2	Kotabaru	5	6.2	5	2	1	5	5
3	Pakualaman	8	3.88	8	2	4	4	8
4	Kraton	14	2.21	14	2	5	10	14
5	Kotagede	31	1	27	3	26	8	30
Total		68		64	10	37	37	67

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 5. Normalisasi Index Kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB

No	KCB	Variabel Indeks Kenyamanan Berdasarkan Kriteria Pelestarian BCB					Total Nilai Index	Nilai Index (%)
		Perubahan Bentuk Bangunan	Perubahan Fungsi Bangunan	Status Kepemilikan Bangunan	Status Penggunaan Bangunan	BCB yang Dihancurkan/ Proses Penghancuran		
1	Malioboro	100	10	10	100	100	320	64
2	Kotabaru	100	40	20	100	100	360	72
3	Pakualaman	100	25	50	100	100	325	65
4	Kraton	100	14.3	35.7	100	100	321.43	64.3
5	Kotagede	87.1	9.7	83.9	96.8	96.8	303.23	60.6
TOTAL							500	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Asumsi pemberian nilai index kenyamanan tertinggi adalah 100 dan terendah adalah 10. Maka pembagian skoring/pembobotannya adalah indeks kenyamanan tinggi bernilai 100-70, sedang/cukup bernilai 70-40 dan rendah bernilai 40-10. Apabila dilihat dari analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai indeks kenyamanan di lima KCB Kota Yogyakarta dalam upaya perlindungan bangunan cagar budaya tergolong tinggi dan cukup tinggi dengan nilai berkisar 72%-60,6%. Hal ini telah sesuai dengan hasil perhitungan IAP yang menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota ternyaman dalam pelestarian bangunan cagara budaya di Indonesia.

Dari tabel diatas, dapat diperoleh hasil bahwa nilai index kenyamanan tertinggi dalam pelestarian bangunan cagar budaya adalah Kawasan Cagar Budaya Kotabaru dengan prosentase nilai index kenyamanannya 72%, kemudian Kawasan Cagar Budaya Pakualaman dengan 64,3%; Kawasan Cagar Budaya Kraton dengan 64%; Kawasan Cagar Budaya Malioboro dengan 64% dan yang memiliki nilai prosentase index kenyamanan terendah adalah Kawasan Cagar Budaya Kotagede dengan nilai index kenyamanan 60.6%. Berikut merupakan penjelasan rincian perolehan hasil:

Kawasan Cagar Budaya Kotabaru

Sampel bangunan cagar budaya yang berada di KCB Kotabaru adalah 5 bangunan, dengan jumlah populasi BCB mencapai 16 bangunan. Dari 5 bangunan, sebanyak 5 bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, baik itu mendirikan bangunan, memperluas, mengubah, mengurangi maupun memugar BCB (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2018). Untuk variabel perubahan fungsi hanya 2 bangunan yang merubah fungsinya dari rumah tinggal pribadi menjadi pemerintahan (Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta) dan kantor (PT. Sarana Yogya Ventura). Variabel status kepemilikan sebanyak 1 bangunan merupakan hak milik pribadi dan 9 bangunan merupakan sewa, dimana hal ini disebabkan kepemilikan tanah dan bangunan merupakan pemerintah Kota Yogyakarta. Sedikitnya

bangunan milik pribadi juga didukung oleh status penggunaan lahan yaitu 5 BCB digunakan secara kelompok. Penggunaan secara kelompok ini merupakan bangunan dengan fungsi fasilitas umum, perdagangan jasa dan restoran. Untuk variabel bangunan yang dihancurkan, sebanyak 5 bangunan tidak melakukan penghancuran atau dalam proses penghancuran, karena seluruh bangunan tidak melakukan perubahan bentuk BCB.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KCB Kotabaru memiliki indeks kenyamanan tipologi 1 (paling tinggi) untuk upaya pelestarian bangunan cagar budaya karena 100% BCB tidak mengalami perubahan bentuk sehingga tidak melanggar aturan pelestarian dari pemerintahan daerah DIY (Perda, 2012), 40% BCB mengalami perubahan fungsi sehingga upaya peningkatan pemanfaatan bangunan tergolong tinggi, 20% BCB merupakan milik pribadi sehingga rasa keeratan pemilik dengan bangunan cagar budaya sebagai identitas kehidupan sosial masih kurang yang dikhawatirkan akan mempermudah pengguna bangunan untuk mengubah BCB, sebanyak 100% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum sehingga alokasi dana untuk melakukan pelestarian BCB tergolong tinggi, serta sebanyak 100% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih bisa dipertahankan dan ini merupakan salah satu upaya pelestarian.

Berdasarkan Kleden & Fanani (2016) disebutkan bahwa Kawasan Cagar Budaya Kotabaru memiliki bangunan bercorak kolonial sehingga dilarang untuk diubah menjadi fasad Jawa, atau bentuk lain yang tak mencerminkan fasad khas Indiesch. Hal ini telah sesuai dengan hasil survey, dimana disebutkan 100% bangunan cagar budaya di KCB Kotabaru tidak mengalami perubahan bentuk dan tidak dalam proses penghancuran. Perubahan fungsi yang dilakukan diperbolehkan selama tidak merubah bentuk fasade bangunan cagar budaya (Djunaidi, dkk, 2015).



Sumber : Survei Lapangan, 2018

Gambar 2. Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Bangunan Cagar Budaya yang mengalami perubahan fungsi (Kiri)

Kawasan Cagar Budaya Pakualaman

Sampel bangunan cagar budaya yang berada di KCB Pakualaman adalah 8 bangunan, dengan jumlah populasi BCB mencapai 21 bangunan. Dari 8 bangunan, sebanyak 8 bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, baik itu mendirikan bangunan, memperluas, mengubah, mengurangi maupun memugar BCB (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

DIY, 2018). Untuk variabel perubahan fungsi hanya 2 bangunan yang merubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi restoran dan hotel. Variabel status kepemilikan sebanyak 4 bangunan merupakan hak milik pribadi dan 4 bangunan merupakan sewa, dimana hal ini disebabkan kepemilikan tanah dan bangunan merupakan milik kesultanan Yogyakarta. Sebanyak 4 bangunan dipergunakan secara kelompok dan sisanya digunakan untuk pribadi, yang dominannya dipergunakan sebagai rumah tinggal. Sedangkan penggunaan secara kelompok merupakan bangunan dengan fungsi fasilitas umum, perdagangan jasa dan hotel. Untuk variabel bangunan yang dihancurkan sebanyak 8 bangunan tidak melakukan penghancuran atau dalam proses penghancuran, karena seluruh bangunan tidak melakukan perubahan bentuk BCB.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KCB Pakualaman memiliki indeks kenyamanan tipologi 2 untuk upaya pelestarian bangunan cagar budaya karena 100% BCB tidak mengalami perubahan bentuk sehingga tidak melanggar aturan pelestarian dari pemerintahan daerah DIY (Perda, 2012), 25% BCB mengalami perubahan fungsi sehingga upaya peningkatan pemanfaatan bangunan tergolong cukup tinggi, 50% BCB merupakan milik pribadi sehingga rasa keeratan pemilik dengan bangunan cagar budaya sebagai identitas kehidupan sosial masih tergolong cukup tinggi sehingga diharapkan dengan eratnya rasa kepemilikan, maka perubahan bentuk bangunan dapat diminimalisir, sebanyak 50% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum sehingga alokasi dana untuk melakukan pelestarian BCB masih tergolong cukup tinggi, serta sebanyak 100% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih bisa dipertahankan dan ini merupakan salah satu upaya pelestarian.



Sumber : Survei Lapangan, 2018

Gambar 3. Perubahan Fungsi Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman

Kawasan Cagar Budaya Kraton

Sampel bangunan cagar budaya yang berada di KCB Kraton adalah 14 bangunan, dengan jumlah populasi BCB mencapai 43 bangunan. Dari 14 bangunan, sebanyak 14 bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, baik itu mendirikan bangunan, memperluas, mengubah, mengurangi maupun memugar BCB (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2018). Untuk variabel perubahan fungsi hanya 2 bangunan yang merubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi perdagangan (restoran). Variabel status kepemilikan sebanyak 5 bangunan merupakan hak milik pribadi dan 9 bangunan merupakan sewa, dimana hal ini disebabkan kepemilikan tanah dan bangunan merupakan milik kesultanan Yogyakarta. Sedikitnya bangunan milik pribadi juga didukung oleh sedikitnya guna bangunan personal yaitu hanya 4 BCB sedangkan 10 BCB digunakan secara kelompok. Penggunaan secara kelompok ini merupakan bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan restoran. Untuk

variabel bangunan yang dihancurkan sebanyak 14 bangunan tidak melakukan penghancuran atau dalam proses penghancuran, karena seluruh bangunan tidak melakukan perubahan bentuk BCB.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KCB Kraton memiliki indeks kenyamanan tipologi 3 untuk upaya pelestarian bangunan cagar budaya karena 100% BCB tidak mengalami perubahan bentuk sehingga tidak melanggar aturan pelestarian dari pemerintahan daerah DIY (Perda, 2012), 14,3% BCB mengalami perubahan fungsi sehingga upaya peningkatan pemanfaatan bangunan tergolong rendah, 35,7% BCB merupakan milik pribadi sehingga rasa keeratan pemilik dengan bangunan cagar budaya sebagai identitas kehidupan sosial tergolong rendah sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah BCB yang mengalami perubahan bentuk/dihancurkan, sebanyak 71,4% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum sehingga alokasi dana untuk melakukan pelestarian BCB masih tergolong tinggi, serta sebanyak 100% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih bisa dipertahankan dan ini merupakan salah satu upaya pelestarian.



Sumber : Survei Lapangan, 2018

Gambar 4. Perubahan Fungsi Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Kraton

Kawasan Cagar Budaya Malioboro

Sampel bangunan cagar budaya yang berada di KCB Malioboro adalah 10 bangunan, dengan jumlah populasi BCB mencapai 32 bangunan. Dari 10 bangunan, sebanyak 10 bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, baik itu mendirikan bangunan, memperluas, mengubah, mengurangi maupun memugar BCB (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2018). Untuk variabel perubahan fungsi hanya 1 bangunan yang merubah fungsinya dari rumah tinggal pribadi menjadi rumah kos-kosan. Variabel status kepemilikan sebanyak 1 bangunan merupakan hak milik pribadi dan 9 bangunan merupakan sewa, dimana hal ini disebabkan kepemilikan tanah dan bangunan merupakan milik kesultanan Yogyakarta. Sedikitnya bangunan milik pribadi juga didukung oleh guna bangunan personal yaitu 10 BCB digunakan secara kelompok. Penggunaan secara kelompok ini merupakan bangunan dengan fungsi fasilitas umum, perdagangan jasa dan restoran. Untuk variabel bangunan yang dihancurkan sebanyak 10 bangunan tidak melakukan penghancuran atau dalam proses penghancuran, karena seluruh bangunan tidak melakukan perubahan bentuk BCB.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KCB Malioboro memiliki indeks kenyamanan tipologi 4 untuk upaya pelestarian bangunan cagar budaya karena 100% BCB tidak mengalami perubahan bentuk sehingga tidak melanggar aturan pelestarian dari pemerintahan daerah DIY (Perda, 2012), 10% BCB mengalami perubahan fungsi sehingga upaya peningkatan pemanfaatan bangunan tergolong rendah, 10% BCB merupakan milik

pribadi sehingga rasa keeratan pemilik dengan bangunan cagar budaya sebagai identitas kehidupan sosial tergolong rendah yang dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah BCB yang mengalami perubahan bentuk/dihancurkan, sebanyak 100% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum sehingga alokasi dana untuk melakukan pelestarian BCB tergolong tinggi, serta sebanyak 100% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih bisa dipertahankan dan ini merupakan salah satu upaya pelestarian.



Sumber : Survei Lapangan, 2018

Gambar 5. Perubahan Fungsi Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Malioboro

Kawasan Cagar Budaya Kotagede

Sampel bangunan cagar budaya yang berada di KCB Kotagede adalah 31 bangunan, dengan jumlah populasi BCB mencapai 96 bangunan. Dari 31 bangunan, sebanyak 27 bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan 4 bangunan mengalami perubahan bentuk disebabkan terjadinya bencana gempa yang menyebabkan bangunan rubuh sehingga mendirikan bangunan baru atau memang mengubah menjadi bangunan baru dengan alasan estetika. Untuk variabel perubahan fungsi hanya 3 bangunan yang merubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi perdagangan dan jasa serta fungsi pemerintahan (Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta). Variabel status kepemilikan sebanyak 26 bangunan merupakan hak milik pribadi dan 5 bangunan merupakan sewa, dimana hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya fungsi peruntukan BCB sebagai rumah tinggal. Banyaknya bangunan milik pribadi juga didukung oleh banyaknya guna bangunan secara personal yaitu 29 BCB sedangkan 8 BCB digunakan secara kelompok. Variabel bangunan yang dihancurkan sebanyak 30 bangunan tidak melakukan penghancuran atau dalam proses penghancuran, sedangkan sisanya sebanyak 1 bangunan melakukan penghancuran karena bencana gempa yang merobohkan bangunan cagar budaya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KCB Kotagede memiliki indeks kenyamanan tipologi 5 (terendah) untuk upaya pelestarian bangunan cagar budaya karena 87,1% BCB tidak mengalami perubahan bentuk sehingga masih ada sekitar 12,9% BCB telah melanggar aturan pelestarian dari pemerintahan daerah DIY (Perda, 2012), 9,7% BCB mengalami perubahan fungsi sehingga upaya peningkatan pemanfaatan bangunan tergolong rendah, 83,9% BCB merupakan milik pribadi sehingga rasa keeratan pemilik dengan

bangunan cagar budaya sebagai identitas kehidupan sosial tergolong tinggi yang berdampak pada jumlah bangunan cagar budaya yang mengalami perubahan bentuk, sebanyak 25,8% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum sehingga alokasi dana untuk melakukan pelestarian BCB tergolong rendah, serta sebanyak 96,8% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih bisa dipertahankan dan ini merupakan salah satu upaya pelestarian.



Sumber : Survei Lapangan, 2018

Gambar 6. Perubahan Bentuk Bangunan Cagar Budaya (Kiri dan Kanan Bawah) dan Perubahan Fungsi Tempat Tinggal menjadi Fungsi Jasa (Kanan Atas) di Kawasan Cagar Budaya Kotagede

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti teliti sebelumnya, diperoleh hasil bahwa upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta dalam kondisi baik, dimana hampir 80% responden mengatakan bahwa upaya pelestarian di masing-masing kawasan cagar budaya telah berjalan. Hal ini terlihat dari upaya pelestarian oleh pemerintah kota Yogyakarta, seperti penyusunan dokumen pedoman pelestarian kawasan cagar budaya, pemberian insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya, pemeliharaan bangunan cagar

budaya dengan SK Menteri yang dilakukan dengan bantuan negara (Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY), dan terdapat tim pengkaji bangunan bersejarah/kuno sebelum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Upaya pemerintah tersebut juga didukung oleh pemilik/pengguna bangunan cagar budaya dimana hampir 80% mengatakan bahwa kondisi pelestarian di masing-masing kawasan cagar budaya dalam kondisi bagus (survey primer, 2018). Tidak terjadinya perubahan bentuk bangunan juga didukung oleh upaya pelestarian Kota Yogyakarta berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota, dimana ketika satu zona yang tidak memiliki bangunan cagar budaya harus menyesuaikan dengan ketentuan atau aturan yang sama seperti zona yang memiliki bangunan cagar budaya (Kleden & Fanani, 2016).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keberadaan bangunan cagar budaya di suatu kota akan menambah nilai identitas lingkungan yang merupakan penciri kawasan dan karakteristik masyarakat yang tinggal didalamnya. Nilai indeks kenyamanan di Kota Yogyakarta untuk kriteria pelestarian bangunan cagar budaya tertinggi berada di kawasan cagar budaya Kotabaru (72%), kemudian kawasan cagar budaya Pakualaman (65%), kawasan cagar budaya Kraton (64,3%), selanjutnya kawasan cagar budaya Malioboro (64%) dan terendah adalah kawasan cagar budaya Kogede (60,6%). Kawasan cagar budaya Kotabaru memiliki indeks kenyamanan tertinggi karena sebanyak 100% BCB tidak mengalami perubahan bentuk, 40% BCB mengalami perubahan fungsi (dimana untuk variabel ini, Kotabaru memiliki nilai prosentase tertinggi dibandingkan KCB lainnya), 20% BCB merupakan milik pribadi, 100% BCB dipergunakan untuk kelompok/umum dan 100% BCB tidak dihancurkan dan/atau dalam proses penghancuran sehingga bentuk asli BCB masih bisa dipertahankan. Variabel perubahan fungsi akan menambah nilai bangunan cagar budaya, sedangkan perubahan bentuk akan mengurangi nilai bangunan cagar budaya. Variabel kepemilikan bangunan cagar budaya akan memberikan nilai tambah apabila berupa milik pribadi karena akan menambah ikatan atas identitas pemilik. Sedangkan untuk variabel pengguna bangunan akan memberikan nilai tambah apabila dipergunakan secara bersama/kelompok, karena akan mempermudah dalam membayar biaya perawatan bangunan cagar budaya. Faktor bencana alam dan ekonomi bisa menjadi salah satu alasan pemilik bangunan untuk merubah bentuk BCB, ditunjang oleh kurangnya bantuan pemerintah kota untuk membantu dalam menyediakan dana perawatan BCB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini melalui Hibah Penilitain Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018. Terima kasih juga ditujukan kepada STTNAS dan pemerintah Kota Yogyakarta serta Balai Pelestarian Cagar Budaya atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, Karen. 2000. Urban Amenity Indicators: The Livability of Our Urban Environments. Ministry for the Environment of Auckland City.
- Darise D.I, Tondobala L, Gosal P.H.2015. Kajian Kota Manado sebagai Kota Layak Huni berdasarkan Kriteria (IAP) Ikatan Ahli Perencanaan. [Skripsi]: Universitas Sam Ratulangi. 1(1): 131-140.
- Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2018
- Hadiyanta Ign, Eka. 2015. Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang. Yogyakarta: Jurnal Widya Prabha. Vol. 04/ IV/ 2015

- Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). 2016. The Most Liveable City in Indonesia. https://www.issuu.com/iapindonesia/docs/mlci_2014_presentasi_compatibility. Diakses pada 03 Juni 2017
- Kladen U.C, Fanani F. 2016. Harmonisasi Ketentuan Peruntukan Bangunan Cagar Budaya dalam Perspektif Regulasi di Kawasan Budaya Kotabaru, Kota Yogyakarta-DIY. Jurnal ReTII STTNAS. ISSN: 1907-5995. Yogyakarta
- Marbun J. 2012. Pelestarian Benda dan Bangunan Cagar Budaya di Yogyakarta. <https://joemarbun.wordpress.com/permasalahan-kawasan-cagar-budaya>. Diakses pada 28 April 2018
- Muttaqin D. 2010. Most Livable City Index, Tantangan Menuju Kota Layak Huni. Bulletin Tata Ruang Edisi Januari-Februari 2010. ISSN: 1978-1571. Jakarta: Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. 2017. Visi dan misi Kota Yogyakarta. Diakses pada 28 Agustus 2018 dari <https://jogjaproov.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Yogyakarta
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. (2013).
- Sujarweni, Wiranta. 2015. SPSS untuk Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Tan, Thye, et al. 2014. A New Approach to Measuring the Liveability of Cities: the Global Liveable Cities Index. World Review of Science, Technology and Sustainable Development. Vol 11, No.2, 2014.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda dan Bangunan Cagar Budaya.
- Wahyudi D. 2012. Kepemilikan Benda Cagar Budaya (Antara Kewajiban dan Hak). <http://pusakanuswantara.blogspot.com/2012/10/kepemilikan-benda-cagar-budaya-antara.html>. Diakses 27 Mei 2018
- Wheeler, Stephen. 2004. The Sustainable Urban Development Reader. Psychological Press. New York
- Widyanto, Andreas Haryo. 2016. Perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk bisnis waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta. Diakses pada 27 Agustus 2018 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11582>.
- Wirastari, Amanda & Suprihardjo, Rimadewi. 2012. Pelestarian keawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat (studi kasus: kawasan cagar budaya Bubutan, Surabaya). Jurnal teknik ITS, 1(1), 63-67